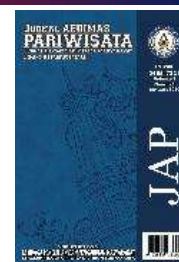


Event *Fun Trail Run* Nyigar Alas Watusigar: Kolaborasi Multipihak guna Mendukung Pengembangan *Sport Tourism* Berkelanjutan

*Runavia Mulyasari¹, Mohamad Rachmadian Narotama², Popi Irawan³

¹⁻³Program Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,

email:runavia.mulyasari@ugm.ac.id



Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel Diterima : 22 Januari 2026 Revisi : 8 Juli 2026 Dipublikasikan : 15 Juli 2026 Kata kunci: Desa Wisata Watusigar Pariwisata Olahraga <i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i> Pariwisata Berbasis Masyarakat	Kabupaten Gunungkidul menghadapi kerentanan sosial-ekonomi yang ditandai oleh tingginya persentase penduduk miskin dan urbanisasi yang berdampak pada kapasitas modal manusia di tingkat desa. Kalurahan Watusigar memiliki potensi pengembangan desa wisata melalui pemanfaatan lanskap ekologis dan kekayaan budaya lokal. Namun, masih terdapat kesenjangan tata kelola, keterbatasan diversifikasi produk wisata, dan kapasitas kelembagaan Pokdarwis. Artikel ini menganalisis perencanaan dan implementasi <i>Fun Trail Run</i> “Nyigar Alas Watusigar” sebagai inovasi produk berbasis sport tourism melalui pendekatan <i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i> dan <i>Community-Based Tourism (CBT)</i>. Metode PRA dilakukan melalui pemetaan sosial, FGD, penentuan prioritas masalah, dan penyusunan rencana aksi partisipatif. Hasil menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak mampu memperkuat perencanaan, co-production of knowledge, dan kapasitas manajerial Pokdarwis. <i>Fun Trail Run</i> juga mendorong diversifikasi produk, penguatan citra destinasi, dan partisipasi masyarakat. Integrasi PRA dan CBT berpotensi menjadi model pengembangan sport tourism berkelanjutan yang dapat direplikasi di desa wisata lainnya.
Keywords:	ABSTRACT
<i>Watusigar Tourism Village</i> <i>Sport Tourism</i> <i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i> <i>Community-Based Tourism (CBT)</i>	<i>Fun Trail Run Nyigar Alas Watusigar: Multi-Stakeholder Collaboration for Sustainable Sport Tourism Development.</i> Gunungkidul Regency faces significant socio-economic vulnerability, characterized by a high poverty rate and urbanization that affects human capital capacity at the village level. Watusigar Village has considerable potential for tourism development through its ecological landscape and local cultural heritage. However, gaps in governance, limited tourism product diversification, and weak institutional capacity of the Tourism Awareness Group (Pokdarwis) remain challenges. This article analyzes the planning and implementation of the “Nyigar Alas Watusigar” <i>Fun Trail Run</i> as a tourism product innovation based on sport tourism, using <i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i> and <i>Community-Based Tourism (CBT)</i> approaches. PRA was implemented through social mapping, focus group discussions, problem prioritization, and participatory action planning. The findings demonstrate that multi-stakeholder collaboration strengthened planning quality, facilitated the co-production of knowledge, and improved the managerial capacity of Pokdarwis. The <i>Fun Trail Run</i> also contributed to tourism product diversification, destination image enhancement, and community participation. Integrating PRA and CBT offers a practical model for sustainable, community-based sport tourism development that can potentially be replicated in other tourism villages in Indonesia.

Pendahuluan

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan sosial-ekonomi yang menonjol di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun tren penurunan angka kemiskinan menunjukkan arah positif dalam satu dekade terakhir, persentase penduduk miskin masih berada pada kisaran 15,18%, hanya sedikit lebih rendah dibandingkan Kabupaten Kulon Progo (15,62%). Kerentanan ini berkorelasi dengan fenomena urbanisasi desa ke kota, yang memicu mobilitas penduduk usia produktif keluar dari wilayah pedesaan. Konsekuensinya adalah menurunnya ketersediaan modal manusia (*human capital*) di tingkat lokal, termasuk di Kalurahan Watusigar, Kapanewon Ngawen. Dari total 2.022 KK (5.675 jiwa), sebanyak 287 KK masih dikategorikan sebagai rumah tangga miskin. Struktur mata pencaharian yang didominasi oleh petani dan buruh tani (1.778 jiwa) menunjukkan ketergantungan ekonomi pada sektor primer yang rentan terhadap perubahan iklim, fluktuasi pasar, dan siklus produksi pertanian musiman.

Dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional, RPJMN 2025 menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui transformasi struktur ekonomi pedesaan. Salah satu instrumen yang diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah pengembangan desa wisata. Kalurahan Watusigar memiliki posisi strategis secara spasial karena berada di kawasan penyangga Masterplan Hutan Keistimewaan Wana Boga yang diarahkan sebagai “Wana Wisata Edukasi”. Posisi ini memberikan peluang bagi Watusigar untuk mengembangkan destinasi berbasis lanskap ekologis, interpretasi lingkungan, serta aktivitas rekreasi berbasis alam. Pemerintah kalurahan telah membentuk Pokdarwis Watusigar Suminar dan mulai mengembangkan Taman Kuliner Soka sebagai embrio atraksi. Momentum penguatan kelembagaan semakin signifikan ketika Watusigar ditetapkan sebagai Desa Wisata Sembrani pada Desember 2023, dengan 27 anggota Pokdarwis sebagai penggerak utama.

Namun, hasil FGD awal mengidentifikasi adanya tantangan struktural yang menghambat efektivitas implementasi desa wisata. Pertama, tata kelola kelembagaan belum berjalan optimal. Kapasitas administratif dan perencanaan Pokdarwis masih terbatas, sehingga proses kerja cenderung reaktif dan belum berbasis data. Kedua, diversifikasi produk wisata masih rendah. Orientasi yang terlalu fokus pada komoditas hortikultura melon belum terintegrasi dengan jejaring pasar wisata yang lebih luas. Ketiga, manajemen internal Pokdarwis belum efektif, tampak dari lemahnya sistem pembagian tugas, minimnya inovasi program, dan terbatasnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Kondisi ini mencerminkan adanya *gap* antara desain kebijakan pengembangan desa wisata dan kapasitas implementatif di level komunitas, sebagaimana dikemukakan dalam literatur governance gap pada pembangunan pariwisata pedesaan.

Dalam konteks tersebut, konsep *Community-Based Tourism* (CBT) menjadi kerangka teoretis yang relevan untuk menelaah dan merumuskan strategi penguatan. CBT menempatkan masyarakat sebagai aktor sentral, bukan sekadar objek pembangunan. Prinsip-prinsip utama dalam CBT meliputi partisipasi aktif, pemberdayaan komunitas, distribusi manfaat yang merata, dan keberlanjutan sumber daya lokal (Giampiccoli & Saayman, 2014). Okazaki (2008) menegaskan bahwa keberhasilan CBT memerlukan kapasitas kelembagaan yang memadai, terutama dalam perencanaan partisipatif, pengorganisasian komunitas, pengelolaan aset, dan manajemen konflik. Dengan demikian, tantangan kelembagaan yang dihadapi Pokdarwis Watusigar menunjukkan perlunya intervensi yang bersifat struktural dan berbasis pada penguatan institusi lokal.

Untuk memastikan prinsip CBT terimplementasi secara konsisten, pendekatan metodologis yang partisipatif sangat dibutuhkan. *Participatory Rural Appraisal* (PRA) menjadi salah satu metode yang secara teoretis kompatibel dengan CBT. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor analitis yang terlibat dalam identifikasi masalah, pemetaan potensi, perumusan strategi, hingga pengambilan keputusan (Chambers, 1994; Cole, 2006). PRA menekankan pembelajaran kolektif, keputusan kolektif, dan keterhubungan antar pemangku kepentingan, sehingga proses pembangunan tidak hanya responsif terhadap kebutuhan komunitas tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap

program yang dirancang. Dalam konteks pengembangan desa wisata Watusigar, PRA dapat menjadi instrumen untuk mengatasi hambatan partisipasi, mengoptimalkan proses perencanaan Pokdarwis, serta mendorong penyelarasan kepentingan lintas aktor.

Selain intervensi kelembagaan dan partisipatif, diversifikasi produk wisata menjadi agenda penting dalam meningkatkan daya saing destinasi. Salah satu sektor dengan potensi tinggi adalah *sport tourism*, yaitu integrasi aktivitas olahraga dalam pengalaman wisata (Gibson, 1998). Dalam beberapa tahun terakhir, *sport tourism* berkembang pesat dan menjadi salah satu segmen pariwisata yang paling dinamis di dunia, terutama dalam bentuk *active sport tourism* seperti lari, bersepeda, pendakian, dan aktivitas luar ruangan lainnya (Higham & Hinch, 2009). Pada konteks desa wisata seperti Watusigar, *sport tourism* dinilai strategis sebagai upaya untuk diversifikasi produk wisata karena mampu menarik segmen pasar baru, khususnya wisatawan muda yang menyukai aktivitas petualangan dan pengalaman autentik berbasis alam (Weed, 2014). Kegiatan trail run, misalnya, dapat menjadi salah satu bentuk kegiatan wisata yang mengintegrasikan daya tarik lanskap desa dengan pengalaman olahraga yang menantang dan menyenangkan. Pengembangan kegiatan serupa dapat mendorong wisatawan untuk mengeksplorasi ruang-ruang alam yang ada di lokasi wisata.

Namun demikian, pengembangan dan diversifikasi kegiatan pariwisata yang berkelanjutan menuntut keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, diantaranya pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas (Bramwell & Lane, 2011). Kolaborasi multipihak diperlukan untuk menciptakan kegiatan wisata yang lebih berkelanjutan dan berimbang, baik dalam dimensi ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan. Kolaborasi multipihak ini tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas program, tetapi juga menjamin keberlanjutan kegiatan melalui komitmen bersama dan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan.

Berangkat dari kerangka teoretis tersebut, Program Studi Pariwisata, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada menginisiasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Fun Trail Run "Nyigar Alas Watusigar" pada tahun 2025. Event ini dirancang sebagai inovasi produk wisata yang memadukan sport tourism, CBT, dan PRA. Kolaborasi multipihak yang melibatkan akademisi, mahasiswa, pemerintah kalurahan, Pokdarwis, dan masyarakat menjadi fondasi utama untuk memastikan keberlanjutan program serta distribusi manfaat yang inklusif. Integrasi prinsip-prinsip partisipatif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan Pokdarwis, meningkatkan keterampilan manajerial, serta memperluas jejaring kerja lintas sektor.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan dan implementasi *Fun Trail Run* "Nyigar Alas Watusigar" sebagai model kolaborasi multipihak berbasis *Participatory Rural Appraisal* dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Sembrani Watusigar. Analisis ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan literatur pembangunan desa wisata berbasis komunitas, tetapi juga menawarkan model implementatif yang dapat direplikasi pada konteks desa wisata lainnya di Indonesia.

Metode

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) sebagai kerangka utama dalam merancang, melaksanakan, dan merefleksikan penyelenggaraan event Fun Trail Run "Nyigar Alas Watusigar". Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan produk wisata desa yang sesuai dengan potensi alam dan non-alam yang ada di Watusigar.

Pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA)

Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) adalah pendekatan partisipatif yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat untuk menganalisis kondisi, mengidentifikasi masalah, serta merancang solusi sesuai kebutuhan dan konteks lokal mereka sendiri. PRA berkembang dari pendekatan *Rapid Rural Appraisal* (RRA), namun lebih menekankan pada proses fasilitasi dan keterlibatan aktif masyarakat, bukan hanya pengumpulan data oleh peneliti atau fasilitator (Chambers, 1994). PRA menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perencanaan. Dalam konteks pengabdian masyarakat dan pemberdayaan desa wisata, metode ini sangat relevan karena mendorong Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) untuk ikut serta dalam proses identifikasi potensi dan permasalahan desa secara kolektif. Tahapan dalam PRA meliputi: (1) pemetaan sosial, (2) identifikasi masalah, (3) diskusi kelompok terarah (FGD), (4) penentuan prioritas masalah, (5) perumusan solusi, dan (6) penyusunan rencana aksi partisipatif. Masyarakat dilibatkan mulai dari penggambaran peta desa, kalender musiman, hingga diagram aliran keputusan (Muhsin *et al.*, 2018)

Hudayana *et al.* (2019) mengulas keberhasilan PRA sebagai metode dalam menyusun CAP (*Community Action Plan*) di Dusun Pucung, Wukirsari, Bantul. Melalui metode tersebut, warga dapat lebih cermat dalam memetakan potensi budaya untuk program pariwisata, membangun program yang lebih aspiratif dan menggerakkan partisipasi masyarakat yang tinggi. Dengan PRA, mereka sadar bahwa banyak program pembangunan yang masuk ke desa tetapi miskin partisipasi dan warga tidak dapat mewujudkannya karena tidak memiliki model yang disusun dari pengalaman yang memadai. Sementara itu, penelitian Ridwan *et al.* (2019) menerapkan PRA dalam empat siklus: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi pada program pelatihan pengolahan hasil pertanian. Model ini telah membantu mengidentifikasi kebutuhan dasar petani, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi di daerah pedesaan. Oleh karena itu, penerapan metode PRA pada komunitas seperti Pokdarwis dapat menjadi subjek aktif dalam pengembangan wisata yang berkelanjutan, berbasis potensi lokal, dan sesuai dengan karakteristik budaya setempat.



Gambar 1. Tahapan *Participatory Rural Appraisal* (PRA)

Tahapan Pelaksanaan

Persiapan dan Koordinasi

Kegiatan ini dilakukan di Desa Watusigar, Kalurahan Watusigar, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Proses perencanaan kegiatan dimulai pada Juli hingga Oktober 2025. Persiapan pelaksanaan program dilakukan melalui tahapan asesmen awal dari *focus group discussion* yang dilakukan bersama Pemerintah Kalurahan Watusigar dan para penggiat desa wisata termasuk Pokdarwis. Melalui pendekatan PRA, masyarakat lokal ditempatkan sebagai mitra aktif dalam proses perencanaan, bukan sekadar penerima program. Proses perencanaan dimulai dengan analisis kebutuhan (*needs assessment*) yang dilakukan melalui observasi partisipatif dan diskusi awal antara tim PkM Prodi Pariwisata FIB UGM, Pemerintah Kalurahan, dan pengelola Desa Wisata Sembrani. Diskusi ini menghasilkan kesepahaman awal bahwa desa membutuhkan inovasi produk wisata yang lebih inklusif, menarik bagi generasi muda, dan memiliki dampak promosi yang luas.

Pelaksanaan Kegiatan

Dalam tahap pelaksanaan program, mitra akan dilibatkan secara aktif dalam melakukan persiapan hingga saat event dilakukan. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2025, dengan jumlah pendaftar kegiatan sebanyak 250 peserta dengan total kehadiran 150 peserta. Kegiatan *Fun Trail Run* ini dimulai di kawasan Taman Soka sebagai titik awal dan akhir dari rute yang dibuat. Dalam pelaksanaannya, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti tim pengabdian kepada masyarakat prodi pariwisata UGM, Pemerintah Kalurahan Watusigar, Pengelola Desa Wisata Sembrani Watusigar, Komunitas lari dan mitra kolaborator (seperti Sriharjo Forest Trail Run, Komunitas pelari lokal, dan regional), dan masyarakat dan relawan lokal yang berperan dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program, tingkat keterlibatan mitra, serta dampak terhadap penguatan kelembagaan dan pengelolaan desa wisata. Proses ini mencakup observasi lapangan, wawancara mendalam, serta evaluasi capaian tiap tahapan kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, dan implementasi program. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan strategis ke depan, sekaligus memastikan bahwa setiap intervensi memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi Pokdarwis dan masyarakat desa.

Hasil dan Pembahasan

Penyelenggaraan *Fun Trail Run* “Nyigar Alas Watusigar” menunjukkan bagaimana pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dapat diterapkan secara efektif dalam pengembangan produk pariwisata berbasis komunitas. Sejak tahap awal, masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, bukan sekadar penerima manfaat. Melalui observasi partisipatif dan dialog intensif antara tim PkM Prodi Pariwisata FIB UGM, Pemerintah Kalurahan Watusigar, dan pengelola Desa Wisata Sembrani, diperoleh kesepahaman bahwa desa membutuhkan inovasi produk wisata yang inklusif, mampu menarik perhatian generasi muda, dan memiliki jangkauan promosi yang lebih luas. Kesepahaman ini menjadi dasar penting dalam merancang event yang tidak hanya bersifat rekreatif, tetapi juga berorientasi strategis untuk penguatan citra desa wisata.

Analisis potensi wisata yang dilakukan secara partisipatif memperlihatkan bahwa Kalurahan Watusigar memiliki kekuatan yang komprehensif dari aspek alam, budaya, dan ekonomi kreatif. Lanskap ekologis seperti Sungai Oya, Watu Lumbung, Segara Anakan, Kampung Hortikultura, hingga area perbukitan dan hutan menawarkan kondisi ideal untuk aktivitas luar ruang dan sport tourism. Kekayaan budaya agraris, seni pertunjukan tradisional, dan arsitektur lokal memperkuat karakter desa sebagai ruang hidup yang otentik. Sementara itu, keberadaan UMKM jenang, caping, olahan pangan, dan kerajinan memperlihatkan potensi ekonomi kreatif untuk dikembangkan sebagai bagian dari rantai nilai wisata. Temuan-temuan ini mendukung pandangan bahwa pariwisata pedesaan yang berkelanjutan harus berakar pada kekhasan lokal dan narasi identitas yang relevan dengan kondisi sosial-budaya setempat.

Tim juga melakukan *forum group discussion* bersama Pokdarwis dan pemerintah desa untuk menggali permasalahan dan kebutuhan program yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Watusigar. Meskipun sudah ditetapkan sebagai desa wisata, Pokdarwis Watusigar Suminar masih menghadapi berbagai permasalahan. Dalam FGD yang dilakukan pada 15 Februari 2025, diketahui terdapat tiga permasalahan utama, yaitu: terkait aspek sosial dan tata kelola, aspek produksi dan promosi, dan yang terakhir aspek manajemen usaha. Pertama, dalam aspek sosial kemasyarakatan mitra masih menghadapi tantangan dalam tata kelola kelembagaan desa wisata, baik secara administratif maupun praktis. Hal ini berdampak terhadap rendahnya kemampuan masyarakat dalam menginisiasi

tindak lanjut pengelolaan desa wisata dan bentuk-bentuk kegiatan wisata lainnya. Kedua, dalam aspek produksi, upaya promosi paket wisata yang dilakukan masih belum berdampak signifikan terhadap kunjungan wisatawan. Paket wisata yang ditawarkan juga masih terbatas potensi hortikultura melon sehingga diversifikasi produk wisata menjadi urgensi yang penting dalam mendukung pemasaran. Selain itu, pemasaran paket wisata masih sebatas melalui platform instagram (@sembraniwatusigar). Mitra juga belum memiliki jalinan kerjasama dan kolaborasi dengan OTA (*online travel agent*)/TO (*travel operator*) untuk memperluas cakupan pemasaran dan memperkuat produktivitas. Ketiga, dalam aspek manajemen usaha, mitra menghadapi permasalahan serius dalam keterlibatan pengurus. Penataan organisasi yang belum sinergis memberikan ruang yang terbatas bagi *local heroes* untuk mengelola potensi wisata yang ada.

Menindaklanjuti identifikasi kebutuhan tersebut, proses perencanaan kemudian dilanjutkan melalui FGD yang melibatkan pemuda, komunitas lokal, serta perwakilan komunitas lari. Pada tahap ini, masyarakat berperan aktif dalam menyampaikan gagasan mengenai rute, kapasitas desa, potensi risiko, serta manfaat prioritas yang diharapkan dari penyelenggaraan event. Keterlibatan tersebut sejalan dengan prinsip PRA yang menekankan pemanfaatan pengetahuan lokal (*local knowledge*) sebagai dasar pengambilan keputusan (Chambers, 1994). Salah satu wujud konkret integrasi pengetahuan lokal tampak pada pemetaan rute yang dipimpin oleh Rahmad Danaji sebagai perwakilan warga Watusigar. Pengetahuan lokal mengenai kondisi medan, titik rawan, serta narasi budaya lokasi tertentu menjadi dasar pengambilan keputusan rute event. Ini menunjukkan terjadinya proses *co-production of knowledge*, yaitu kolaborasi antara pengetahuan akademik dan pengalaman lokal dalam menghasilkan desain program yang relevan dan realistis. Hal ini menunjukkan penerapan nilai inti CBT, yakni pemanfaatan pengetahuan dan sumber daya lokal dalam merancang pengalaman wisata (Okazaki, 2008). Dengan demikian, proses perencanaan memperlihatkan kolaborasi yang menggabungkan perspektif akademik dan keunggulan lokal untuk menghasilkan konsep event yang relevan dengan konteks desa.

Tahap implementasi kegiatan menunjukkan hadirnya model kolaborasi multipihak yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah desa, komunitas lari, pengelola desa wisata, dan masyarakat. Setiap pihak berkontribusi sesuai kapasitasnya, sehingga terbentuk ekosistem kolaboratif yang saling mendukung. Perguruan tinggi berperan sebagai fasilitator, penyedia pendampingan teknis, serta penguatan prinsip keberlanjutan. Pemerintah kalurahan mendukung melalui legitimasi, koordinasi wilayah, dan penyediaan fasilitas. Di sisi lain, komunitas lari menjadi kanal promosi sekaligus penghubung ke jejaring pelari yang lebih luas. Pengelola desa wisata berperan sebagai tuan rumah yang mengorganisasi dukungan lokal, sedangkan masyarakat berperan sebagai *co-creator* dalam desain dan pelaksanaan event. Dalam konteks pengembangan pariwisata, kolaborasi berperan sebagai mekanisme yang mendorong *co-creation*, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan sikap (*social learning*), serta mendorong berbagi sumber daya (*resource sharing*). Kolaborasi ini mengilustrasikan bentuk *multi-stakeholder partnership* yang ideal dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat (Bramwell & Lane, 2011). Meskipun demikian, dinamika kolaborasi ini juga menunjukkan tantangan struktural. Terdapat kecenderungan ketergantungan pada kapasitas perguruan tinggi sebagai *leading actor*, sehingga mengindikasikan perlunya strategi pengalihan peran agar desa dapat mengambil peran lebih dominan pada penyelenggaraan selanjutnya. Selain itu, meskipun koordinasi berjalan baik, belum terdapat sistem atau standar operasional event yang baku untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan tanpa pendampingan kampus. Hal ini menandakan perlunya strategi transfer peran agar Pokdarwis dapat mengambil alih fungsi penyelenggaraan secara mandiri pada periode selanjutnya.

Pelaksanaan event pada 12 Oktober 2025 berhasil mengintegrasikan wisata alam dan olahraga melalui konsep *sport tourism*, khususnya *active sport tourism*. Dua kategori rute, yakni 7 km dan 15 km, dirancang bukan hanya sebagai lintasan lari, tetapi juga sebagai media eksplorasi lanskap Watusigar. Peserta melintasi area perbukitan, persawahan, kebun, dan kawasan hutan yang merepresentasikan karakter ekologis desa. Selain itu, sesi penyampaian informasi mengenai daya tarik

wisata usai peserta mencapai garis finis memperkuat nilai edukatif event. Desain pengalaman ini sejalan dengan pandangan Higham dan Hinch (2009) yang menyatakan bahwa *sport tourism* dapat menjadi pintu masuk strategis dalam memperkenalkan identitas destinasi. Keberhasilan menarik peserta dari luar daerah menunjukkan bahwa event ini mampu memperluas jangkauan pasar wisata desa. Namun demikian, implementasi kegiatan masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dicermati secara kritis untuk peningkatan penyelenggaraan mendatang.

Secara umum, event ini memberikan dampak positif terhadap promosi desa wisata dan pemberdayaan masyarakat. Respons positif peserta dan konten promosi organik melalui media sosial memperluas jangkauan promosi desa secara cepat dan otentik. Desa Watusigar memperoleh eksposur yang signifikan melalui jejaring komunitas lari dan media sosial, sehingga memperkuat promosi organik berbasis pengalaman peserta. Konten event mendapatkan lebih dari 25.000 views di Instagram yang diposting berbagai komunitas lari mitra. Testimoni pelari yang menggambarkan rute sebagai “menantang tetapi menyenangkan” menjadi aset promosi berbasis *word-of-mouth* yang terbukti efektif dalam wisata berbasis komunitas (Putra & Pitana, 2019).

Dari sisi dampak sosial-ekonomi, event ini memberikan kontribusi positif dalam memperkuat promosi destinasi dan meningkatkan kapasitas komunitas. Masyarakat memperoleh pengalaman langsung dalam pengelolaan event, mulai dari koordinasi lapangan, pelayanan keramahan, hingga manajemen rute. Keterlibatan PKK dalam penyediaan water station dan konsumsi peserta beserta delapan UMKM lokal dalam penyediaan konsumsi turut mendorong sirkulasi ekonomi desa. Proses ini mencerminkan prinsip CBT yang menekankan pemberdayaan komunitas dan peningkatan kapasitas lokal (Giampiccoli & Saayman, 2014). Pengelola desa wisata mendapatkan pengalaman mengelola event, menambah jaringan, serta lebih terbuka terhadap bentuk wisata alternatif yang minim dampak lingkungan. Namun, terdapat kekhawatiran mengenai keberlanjutan event setelah pendampingan perguruan tinggi berakhir. Tanpa strategi keberlanjutan dan penguatan kelembagaan, terdapat risiko bahwa kegiatan tidak dapat dilaksanakan kembali secara mandiri oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memperlihatkan bahwa event *Fun Trail Run* “Nyigar Alas Watusigar” menyajikan praktik baik bagi pengembangan pariwisata berbasis *sport tourism* di tingkat desa. Perencanaan partisipatif sejak awal mampu membangun rasa memiliki dan komitmen bersama terhadap keberhasilan kegiatan, sementara kolaborasi multipihak memperkuat kapasitas dan sumber daya desa. Integrasi *sport tourism* dengan kekhasan lokal terbukti efektif menarik segmen wisatawan baru dan memperluas promosi destinasi. Selain itu, penggunaan event sebagai media pembelajaran praktis bagi masyarakat dan mahasiswa memperkaya dampak sosial-pendidikan yang berkelanjutan.

Diskusi dan Refleksi

Diskusi atas pelaksanaan kegiatan *Fun Trail Run* “Nyigar Alas Watusigar” menunjukkan bahwa metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) telah menjadi titik awal yang efektif untuk membuka ruang dialog antara masyarakat dan pendamping. Namun, keterlibatan tersebut masih lebih dominan pada ranah teknis dibandingkan ranah strategis pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masih berada pada tingkat konsultatif, belum mencapai *empowering participation* yang ideal dalam kerangka CBT. Padahal, seperti dijelaskan Okazaki (2008), taraf partisipasi yang transformatif hanya dapat dicapai ketika masyarakat memiliki kuasa dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi program. Keterlibatan masyarakat yang cenderung teknis ini menunjukkan bahwa kapasitas lokal masih dalam tahap penguatan awal. Masyarakat memiliki antusiasme tinggi, tetapi belum sepenuhnya memiliki kapasitas konseptual, manajerial, dan administratif untuk mengelola event secara mandiri. Di sinilah terlihat adanya gap antara partisipasi simbolis dan partisipasi substansial. Pendalaman partisipasi perlu diarahkan agar tidak terjadi pseudo-participation dalam jangka panjang, yaitu kondisi ketika masyarakat tampak aktif, namun tidak memiliki pengaruh nyata terhadap arah dan kebijakan program.

Selain itu, dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fun trail run ini sejalan dengan teori kolaborasi multipihak yang menggarisbawahi bahwa “keterlibatan” tidak selalu setara dengan “kekuasaan” dalam proses pengambilan keputusan (Bramwell & Lane, 2011). Dalam konteks desa wisata, Fitriani dan Hakim (2022) menyebut bahwa ketidakseimbangan kapasitas antarpihak merupakan tantangan umum, terutama ketika kolaborasi melibatkan aktor eksternal seperti perguruan tinggi. Hal inilah yang juga terlihat pada penyelenggaraan *Fun Trail Run* “Nyigar Alas Watusigar”, di mana kapasitas konseptual dan manajerial perguruan tinggi menempatkannya sebagai *leading actor*, sehingga secara tidak langsung menciptakan ketergantungan struktural. Kondisi perlu dikelola secara hati-hati dikarenakan kolaborasi yang tidak disertai strategi transfer kapasitas berpotensi menjadi ad hoc dan berhenti setelah intervensi eksternal berakhir. Oleh karena itu, pendekatan capacity transfer harus dirancang secara sistematis, misalnya melalui pelatihan manajemen event, mentoring teknis, serta pembentukan kelompok kerja lokal yang memegang fungsi perencanaan dan pengorganisasian.

Pelaksanaan kegiatan ini tentu memiliki batasan yang memengaruhi hasil pendampingan; terutama batasan waktu, biaya, dan tenaga untuk pendampingan. Jarak yang jauh dari kampus, sekitar 2 jam, membatasi frekuensi kunjungan lapangan, terutama dosen dan penanggung jawab pendampingan. Sebagian besar interaksi antara kampus dengan masyarakat dilakukan oleh tim lapangan yang terdiri dari mahasiswa Prodi Pariwisata UGM. Waktu pelaksanaan kegiatan juga terbatas hanya 4 bulan, mulai dari perencanaan kegiatan, pembuatan rute bersama, menjalin hubungan dengan komunitas lari, hingga pelaksanaan. Semua dilakukan secara swadaya dengan pembiayaan minim.

Implementasi kegiatan menemukan tiga isu krusial yang menghambat optimalisasi keberlanjutan program. Pertama, keterbatasan pengalaman profesional dalam manajemen event yang menyebabkan beberapa aspek teknis seperti manajemen risiko, *crowd management*, dan *emergency handling* masih bersifat sederhana. Kemampuan teknis yang ditunjukkan masyarakat dinilai belum memenuhi standar event *sport tourism*. Hal ini menjadi evaluasi mengingat kegiatan berbasis olahraga alam memiliki risiko tinggi jika tidak direncanakan dengan protokol keselamatan yang memadai. Kelemahan ini wajar pada tahap awal pengembangan *sport tourism* berbasis komunitas, namun perlu diperbaiki agar event dapat memenuhi standar keamanan dan kenyamanan peserta. Kedua, keterbatasan sumber daya dan pendanaan menahan potensi pengembangan event menuju level yang lebih kompetitif. Minimnya pendanaan menyebabkan event belum dapat dikembangkan dalam skala optimal. Ketidakjelasan model pembiayaan jangka panjang juga membatasi kemampuan desa untuk meningkatkan kualitas fasilitas, promosi, maupun pengalaman peserta. Jika hal ini tidak ditangani, desa sulit meningkatkan kualitas fasilitas penunjang *sport tourism*. Ketiga, isu keberlanjutan lingkungan harus menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis alam. Sebagaimana diingatkan oleh Higham dan Hinch (2009), *sport tourism* yang memanfaatkan ruang alam berpotensi menimbulkan tekanan pada ekosistem jika tidak disertai strategi mitigasi. Penggunaan jalur trail secara berulang memerlukan desain rute yang berdaya dukung ekologis, edukasi etika lari alam bagi peserta, dan pembatasan jumlah peserta sesuai kapasitas lingkungan desa. Strategi *low-impact sport tourism* menjadi penting untuk memastikan bahwa kegiatan meningkatnya kunjungan wisatawan tidak justru merusak daya tarik utama desa.

Refleksi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat telah berjalan, namun masih berada pada tahap *capacity building*, dimana masyarakat mulai berperan, namun belum sepenuhnya menjadi pengendali proses. Untuk mencapai *capacity strengthening* yang mandiri, diperlukan intervensi yang lebih terstruktur, seperti penguatan regulasi desa yang mendukung event, pembentukan tim inti yang memiliki mandat jangka panjang, dan memfasilitasi alih kepemimpinan event dari perguruan tinggi ke desa secara bertahap. Hal ini akan mengurangi risiko ketergantungan terhadap aktor eksternal dan memperkuat keberlanjutan program. Pada dasarnya, perubahan paradigma dari *capacity building* (membangun) ke *strengthening* (penguatan) menunjukkan perubahan fokus dari memperkenalkan sesuatu yang baru menuju fokus pada penguatan sistem dan kapasitas yang sudah ada, dimana penguatan membutuhkan waktu lebih lama serta pendampingan yang lebih intensif dan terstruktur. Bila dibaca dengan *transformational learning theory* (Mezirow, 1997),

proses pembelajaran orang dewasa tidak hanya menerima data dan informasi baru, namun perlu sampai level pembelajaran transformasional dimana seseorang dapat secara kritis menilai dan melakukan adaptasi secara mandiri. Hasil akhirnya menunjukkan *capacity strengthening* di level individual, dan perlu dilanjutkan dengan proses penguatan kelompok di level institusional.

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat tiga prasyarat utama apabila event akan direplikasi atau dilanjutkan secara mandiri. Pertama, diperlukan penguatan tata kelola kolaborasi. Dalam hal ini, dibutuhkan struktur organisasi event yang formal, termasuk pembagian tugas, SOP, sistem komunikasi, dan mekanisme evaluasi. Dengan struktur yang jelas, keberlanjutan tidak bergantung pada individu tertentu. Kedua, pengembangan model bisnis yang inklusif dan adil. Desa perlu merumuskan skema pembiayaan yang jelas, misalnya melalui tiket, paket wisata, kontribusi UMKM, sponsorship, atau kolaborasi BUMDes. Model bisnis harus memastikan distribusi manfaat yang merata dan mendorong partisipasi ekonomi masyarakat lokal. Ketiga, komitmen pada prinsip *low-impact sport tourism*. Penerapan strategi minim dampak ekologis adalah syarat mutlak agar event tidak merusak daya tarik alam yang menjadi basis sport tourism desa. Ketiga prasyarat di atas merupakan upaya untuk menyeimbangkan keberlanjutan masyarakat, ekonomi, dan alam, yang merupakan tiga pilar pembangunan pariwisata berkelanjutan. Komitmen ini harus disepakati oleh seluruh pihak sejak tahap perencanaan. Ketiga prasyarat ini menjadi kunci agar event tidak hanya menjadi kegiatan temporer, tetapi berkembang sebagai strategi pariwisata berkelanjutan yang memperkuat identitas dan kemandirian desa dalam jangka panjang.

Simpulan

Kegiatan “Sigar Alas Watusigar” menunjukkan bahwa penyelenggaraan event *trail run* bukan sekadar kegiatan rekreatif, melainkan dapat menjadi contoh praktik inovatif dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dengan fokus pada *sport tourism*. Event lari tersebut merupakan bentuk pencapaian dari tujuan awal, yaitu melakukan diversifikasi produk wisata untuk meningkatkan *exposure* Desa Watusigar sekaligus kapasitas dan pendapatan masyarakat secara langsung dengan cara yang berkelanjutan. Kegiatan ini menekankan pentingnya melakukan kolaborasi multipihak yang dilaksanakan dengan menggunakan metode *participatory rural appraisal* dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor sentral dalam keseluruhan prosesnya. Pelibatan aktif masyarakat bersama pemerintah desa, perguruan tinggi, komunitas lari, pengelola desa wisata, dan relawan lokal menunjukkan terciptanya bentuk kolaborasi multipihak yang efektif dan adaptif.

Kolaborasi ini menghasilkan peningkatan nyata dalam *sense of ownership*, transfer kapasitas, serta pengalaman langsung masyarakat dalam mengelola event skala komunitas yang melibatkan lebih dari 150 peserta. Secara konseptual, hal ini mengonfirmasi bahwa pelibatan multipihak yang terstruktur dapat memperkuat legitimasi program sekaligus meningkatkan keberlanjutan pengelolaan destinasi (Bramwell & Lane, 2011). Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa pemanfaatan karakteristik lanskap dan potensi alam Watusigar secara kreatif dapat memperluas segmen pasar wisata, terutama di kalangan wisatawan muda, pelari trail, dan wisatawan minat khusus yang mencari pengalaman berbasis olahraga dan petualangan. Model penyelenggaraan event ini dapat dianggap sebagai *best practice* yang potensial untuk direplikasi di desa wisata lain, dengan catatan penyesuaian karakteristik lanskap dan kapasitas komunitas setempat. Penting untuk digarisbawahi bahwa dalam seluruh tahapan, masyarakat lokal tetap diposisikan sebagai subjek utama, sehingga prinsip keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan tetap menjadi rujukan utama.

Berdasarkan hasil kegiatan, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat keberlanjutan inisiatif ini. Pertama, diperlukan pengembangan model event berkelanjutan yang lebih terstruktur dan profesional, meliputi manajemen risiko, desain rute berdaya dukung ekologis, dan peningkatan kualitas layanan peserta. Kedua, perlu dilakukan perluasan kolaborasi multipihak dengan

melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, komunitas pecinta alam, pelaku usaha lokal, dan institusi pemerintah daerah untuk memperkuat dukungan sumber daya, jaringan promosi, serta kesinambungan pendanaan. Ketiga, penting membangun sistem dokumentasi dan evaluasi tahunan agar event dapat berkembang dari sekadar kegiatan komunitas menuju agenda desa yang bersifat institusional dan berkelanjutan. Dengan demikian, “Sigar Alas Watusigar” tidak hanya menjadi contoh keberhasilan pelaksanaan kegiatan sport tourism berbasis komunitas, tetapi juga menjadi fondasi bagi pengembangan inovasi pariwisata yang lebih inklusif dan berorientasi jangka panjang di wilayah pedesaan.

Ucapan Terima Kasih

Pelaksanaan kegiatan Fun Trail Run “Nyigar Alas Watusigar” tidak akan terlaksana tanpa dukungan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi luar biasa sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Program Studi S1 Pariwisata FIB UGM, Himpunan Mahasiswa Pariwisata (HIMAPA) FIB UGM, Dinas Pariwisata Gunungkidul, Pemerintah beserta masyarakat Kalurahan Watusigar, beberapa komunitas lari di DIY yang terlibat, dan pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan seluruhnya. Ucapan terima kasih ini merupakan wujud penghargaan atas kolaborasi multipihak yang memungkinkan kegiatan ini tidak hanya terselenggara dengan baik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi penguatan kapasitas masyarakat dan promosi Desa Watusigar sebagai destinasi wisata berbasis *sport tourism* yang berkelanjutan. Semoga kerjasama ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pihak.

Referensi

- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). *Critical research on the governance of tourism and sustainability*. Journal of Sustainable Tourism, 19(4–5), 411–421. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586>
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World Development*, 22(9), 1253–1268. [https://doi.org/10.1016/0305-750x\(94\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0305-750x(94)90003-5)
- Cole, S. (2006). *Cultural tourism, community participation and empowerment*. In M. Smith & M. Robinson (Eds.), *Cultural Tourism in a Changing World* (pp. 89–103). Channel View Publications.
- Fauzan, S. (2023). Pendampingan Masyarakat dalam Mengembangkan Edu Agrowisata Jeruk Menggunakan Metode PRA. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, 4(1), 7–14. <https://doi.org/10.36276/jap.v4i1.402>
- Fitriani, D., & Hakim, L. (2022). Kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 6(2), 87–101.
- Giampiccoli, A., & Saayman, M. (2014). *A conceptualisation of community-based tourism*. South African Geographical Journal, 96(2), 10–24. <https://doi.org/10.1080/03736245.2014.977813>
- Gibson, H. (1998). *Sport tourism: A critical analysis of research*. Sport Management Review, 1(1), 45–76. [https://doi.org/10.1016/S1441-3523\(98\)70099-3](https://doi.org/10.1016/S1441-3523(98)70099-3)
- Higham, J., & Hinch, T. (2009). *Sport and Tourism: Globalization, Mobility and Identity* (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
- Hudayana, B., Kutaneegara, P. M., Setiadi, S., Indiyanto, A., Fauzanafi, Z., Nugraheni, M. D. F., Sushartami, W., & Yusuf, M. (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan

- Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Bakti Budaya*, 2(2), 3. <https://doi.org/10.22146/bb.50890>
- Mezirow, J. (1997) Transformative Learning: Theory to Practice. *New Directions for Adult and Continuing Education*, 74, 5-12. <http://dx.doi.org/10.1002/ace.7401>
- Muhsin, A., Nafisah, L., & Siswanti, Y. (2018). Participatory rural appraisal (PRA) for corporate social responsibility (CSR).
- Nuryanti, W. (1993). *Concept, perspective and challenges of rural tourism*. In *Proceedings of the International Conference on Rural Tourism* (pp. 1–6). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Okazaki, E. (2008). *A community-based tourism model: Its conception and use*. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(5), 511–529. <https://doi.org/10.1080/09669580802159594>
- Putra, I. G. A. N. A., & Pitana, I. G. (2019). Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata: Studi pada Desa Wisata Penglipuran, Bali. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 6(1), 89–111. <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2019.v06.i01.p05>
- Ridwan, I., Dollo, A., & Andriyani, A. (2019). Implementasi pendekatan participatory rural appraisal pada program pelatihan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 88-94.
- Timothy, D. J. (1998). *Cooperative tourism planning in a developing destination*. *Journal of Sustainable Tourism*, 6(1), 52–68. <https://doi.org/10.1080/09669589808667307>
- Weed, M. (2014). *Sport, Tourism and Sustainability: A Review*. *Journal of Sport & Tourism*, 19(3–4), 171–192. <https://doi.org/10.1080/14775085.2015.1025813>